

S A W E R I G A D I N G

**BIOPOLITIK AMERIKA DALAM NOVEL *PENGACARA JALANAN*
KARYA JOHN GRISHAM**

(The American Biopolitic in Jhon Grisham's Novel Pengacara Jalanan)

Valentina Edellwiz Edwar^a & Muhamad Alfian^b

^aUniversitas Gadjah Mada

Yogyakarta, Jawa Tengah, Indonesia

^bInstitut Agama Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Bengkulu, Indonesia

Pos-el: valentinaedell@mail.ugm.ac.id, muhamalfian8@gmail.com

Naskah Diterima Tanggal 16 Mei 2022; Direvisi Akhir Tanggal 21 November 2023;

Disetujui Tanggal 29 Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.26499/sawer.v29i2.1006>

Abstract

This research aims to reveal the form of homeless life in America which is produced by the state through legal and political power, as well as the resistance of homeless people to this form of life. The theory used is Giorgio Agamben's political philosophy which is manifested in the concept of sovereign power, bare life, and homo sacer or as a whole is called biopolitical criticism. The research method used is qualitative descriptive. Data was collected through literature studies and note-taking techniques. Data analysis was carried out by content analysis: data reduction, data classification, and data analysis. The results of the study were: (1) homeless life experiences ambivalence because it is inside the legal space of the state, as well as being outside the state law because of the impact of political suspension of the law. The ambivalent life of homelessness results in the death of homelessness as a legal-juridical prevalence; (2) The act of homelessness to obtain a happy form of life is realized by moderate actions and radical actions, both of which are faced with sovereign power. John Grisham's novel Pengacara Jalanan is a representative critique of America's democratic pattern of governing the social and political bodies of its citizens.

Keywords: *Pengacara Jalanan, Biopolitik Giorgio Agamben, bare life, homo sacer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk kehidupan tunawisma di Amerika yang diproduksi oleh negara melalui kekuasaan hukum dan politik, sekaligus perlawanan tunawisma di dalam bentuk kehidupan tersebut. Teori yang digunakan adalah filsafat politik Giorgio Agamben yang dimanifestasikan dalam konsep *sovereign power*, *bare life*, dan *homo sacer* atau secara keseluruhan disebut kritik biopolitik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan teknik simak-catat. Analisis data dilakukan dengan analisis isi: reduksi data, klasifikasi data, dan analisis data. Hasil penelitian yaitu: (1) kehidupan tunawisma mengalami ambivalensi karena berada di dalam ruang hukum negara, sekaligus berada di luar hukum negara karena dampak penangguhan hukum secara politik. Kehidupan ambivalent tunawisma mengakibatkan kematian tunawisma sebagai kelaziman secara legal-yuridis; (2) Tindakan tunawisma untuk memperoleh bentuk kehidupan yang bahagia diwujudkan dengan tindakan moderat dan tindakan radikal, yang keduanya dihadapkan pada kuasa kedaulatan. Novel *Pengacara Jalanan* karya John Grisham menjadi kritik atas politik demokrasi Amerika dalam mengatur tubuh politik warga negaranya.

Kata kunci: *Pengacara Jalanan, Biopolitik Giorgio Agamben, bare life, homo sacer*

PENDAHULUAN

Pengacara Jalanan (Grisham, 2010) merupakan sebuah novel terjemahan dari *The Street Lawyer* yang menampilkan kisah-kisah ironis warga Amerika kelas bawah. Novel ini mengisahkan tentang tokoh bernama Michael, seorang pengacara terpandang dan berpenghasilan tinggi memutuskan untuk menjadi pengacara publik bagi para tunawisma setelah menyaksikan bagaimana seorang tunawisma tewas di tembak polisi di depan matanya, yang berlanjut dengan kematian-kematian tunawisma lainnya.

Perjalanan Michael sebagai pengacara publik yang membantu tunawisma untuk memperoleh hak hidup layak secara hukum justru menunjukkan gejala-gejala hukum yang biopolitis, yaitu hukum sebagai alat politik untuk mengatur tubuh warga negara (Agamben, 2020). Michael menghadapi banyak persoalan untuk dapat menghubungkan tunawisma dengan (hukum) negara, ia mesti berhadapan dengan kuasa keuangan, melihat cara tunawisma bertahan di tengah masyarakat pekerja, dan ikut merasakan bagaimana sikap negara terhadap tunawisma.

Sudut pandang Michael sebenarnya dapat menjadi satu cara untuk memandang lanskap hidup tunawisma dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan negara tentang kesejahteraan warga negara. Sudut pandang ini tidak diambil dari tunawisma dan tidak pula diambil dari negara, melainkan dari seorang pengacara yang memahami mekanisme kerja hukum dan janji hukum itu sendiri untuk status warga negara seseorang.

Pengacara Jalanan menjadi representasi dari kondisi ekonomi Amerika pada dekade 1990-an. Pada tahun 1991 Amerika berada pada titik pemulihan ekonomi pascareresi. Pemulihan ekonomi ini berdampak positif pada kenaikan upah sebesar 2,6%. Namun berbanding terbalik dengan kondisi warga Amerika, di saat lonjakan ekonomi tersebut terjadi, taraf hidup warga Amerika semakin menurun,

terutama pada warga Amerika kelas bawah (Mishel et al., 1999) yang tergambar dalam literatur terkenal Amerika saat itu; *Sister Carrie* (Dreiser, 1900), *The Great Gatsby* (Fitzgerald, 1925), *Absalom, Absalom!* (Faulkner, 1936), *Native Son* (Wright, 1940), *Grand Central Winter* (Stringer, 1988). Arus balik ini dapat dimungkinkan terjadi ketika kekuatan ekonomi dikontrol oleh kekuasaan politik.

Kondisi sejak tahun 1990-an ini masih terus bertahan sampai hari ini di Amerika. Di 2016, 40% masyarakat Amerika mengalami kemiskinan parah (Alston, 2017). Data dari The United States Department of Housing and Urban Development (HUD) menunjukkan ada 552.830 tunawisma di Amerika per Januari 2018 yang sebagaimana besar bahkan pahlawan veteran perang (Alamsyah, 2020) (Gunadha, 2017). Pada 2021, Amerika menduduki peringkat ke-10 untuk kemiskinan tertinggi di antara negara OECD (Monica Potts, 2023). Berangkat dari sini, menjadi sangat menarik untuk dapat membaca kembali *Pengacara Jalanan* sebagai kritik pengelolaan warga negara atau yang disebut kekuasaan biopolitik dari sebuah negara adidaya: Amerika.

Novel ini cukup mencuri perhatian peneliti sastra, sehingga ada beberapa tulisan yang telah membahasnya, antara lain: (1) *Social Justice on Jhon Grisham's The Street Lawyer: A Sociological Approach Research Paper* (Azizah, 2007); (2) *Homelessness: John Grisham's View Upon Social Injustice Reflected in The Street Lawyer (A Sociological Approach)* (Utomo, 2008); dan (3) *Poor People Struggle in Grisham's "The Street Lawyer"* (Nasrullah, 2013). Ketiga penelitian ini membahas *The Street Lawyer* dari sisi diskriminasi kaum marginal dan bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi dalam lapisan masyarakat Amerika.

Tulisan ini mengambil bagian yang berbeda, dengan menitikberatkan masalah pada kekuasaan biopolitik dengan menelusuri sumber ketidakadilan tersebut

beroperasi, dengan asumsi adanya kekuatan tertentu dalam politik yang memanfaatkan hukum negara untuk memmanifestasikan penyelewengan hukum demi keuntungan Yang Berdaulat atau Yang Kuasa. Untuk membuktikannya, maka pembacaan akan dilakukan dengan mengidentifikasi peran negara dengan warga negara dalam novel *Pengacara Jalanan*.

Dari paradigma ini, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana negara memproduksi bentuk kehidupan tunawisma sebagai warga negaranya?; dan (2) bagaimana tindakan tunawisma sebagai warga negara untuk menyelamatkan hidupnya dalam ruang politik dan hukum negara?

Teori yang digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam tulisan ini adalah teori dari Giorgio Agamben mengenai kedaulatan negara dan status kewarganegaraan. Agamben menyebutnya, dengan meminjam istilah Foucault, sebagai biopolitik.

KERANGKA TEORI

Biopolitik dimaknai sebagai pengaturan tubuh manusia sebagai makhluk alamiah (*zoe*) menjadi warga negara (*bios*) dengan memberikan hak dan kewajiban tertentu (Agamben, 2020). Namun, hak dan kewajiban ini lepas sejauh identitas kewarganegaraannya dapat dipertanyakan atau bahkan diragukan.

Konsep mengenai biopolitik Agamben sebenarnya dilakukan melalui dua strategi politik, yaitu politik kedaulatan dan politik kewarganegaraan (Alfian, 2019). Negara menjadi berdaulat sejauh warga negara membutuhkan negara itu sendiri. Inilah yang disebut biopolitik, yang bagi Agamben merupakan produk orisinal dari kekuasaan kedaulatan (Agamben, 1998, pp. 6–7). Politik kedaulatan Agamben dimaknai sebagai prosedur totalisasi atau teknik memerintah melalui status kewarganegaraan (Agamben, 1998, p. 11).

Negara dapat meragukan status kewarganegaraan seseorang untuk

melepaskan hak orang tersebut untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan Negara. Ketika warga negara dipertanyakan kewarganegaraannya, maka warga Negara tersebut masuk ke dalam bentuk kehidupan yang disebut *bare life* atau kehidupan telanjang.

Bare life atau kehidupan telanjang merupakan suatu kondisi saat negara melepas hak-hak warga negara sehingga secara otomatis mengeluarkan warga negara dari tatanan politik dan hukum. Hidup telanjang ini berada di ambang batas hidup alamiah dan hidup politik, sehingga segala sesuatu menjadi tidak terbedakan, termasuk membedakan manusia dan binatang (Agamben, 2004, p. 7). Ketika tidak dapat didefinisikan apakah dia manusia atau binatang, maka tidak ada hukum untuknya, artinya dia menjadi layak dibunuh. Yang layak dibunuh ini disebut dengan *homo sacer*.

Homo sacer yang lahir dari dalam *bare life* disebut manusia suci atau manusia sakral (*sacred man*) karena potensinya untuk dibunuh oleh siapa pun tetapi pembunuhnya tidak dapat disebut pembunuh. *Homo sacer* menjadi bagian dari teknik pengeksklusian dalam tradisi politik hari ini. Dalam konsep Agamben disebut dengan *state of exception* atau kondisi eksepsi, yaitu sebuah kondisi penangguhan hukum, bukan penghapusan hukum. Suatu kondisi ketika hukum menjadi tertangguhkan atau tertunda atas sesuatu selama waktu yang tidak ditentukan karena adanya kondisi ekstrem, perang dan semacamnya (Agamben, 2005, p. 2). Namun dalam politik modern hari ini Agamben mengatakan bahwa kondisi eksepsi dapat dilakukan dalam keadaan normal sekali pun.

Homo sacer tidak selalu mati, kemungkinan hidup baginya tetap ada tetapi dalam kondisi kehilangan kendali atau disebut kematian yang hidup (Sudibyo, 2019, p. 46). Dalam perspektif ini, warga negara yang dikonstruksi menjadi *homo sacer* sudah tidak dianggap manusia, boleh dibunuh, dan apabila tidak

mati, ia hanya makhluk yang tidak ada hukum apa pun yang melekat pada tubuhnya.

Ketika hukum tidak melekat padanya, *homo sacer* menempati dua posisi, yakni sebagai objek sekaligus subjek. Sebagai objek, *homo sacer* boleh dibunuh karena tidak dilindungi oleh hukum. Sebagai subjek, karena *homo sacer* tidak terpapar hukum apa pun dari negara, ia memiliki potensi untuk melakukan apa pun karena seluruh tindakannya tidak lagi dibatasi atau dikendalikan oleh hukum-politik yang ada.

Gagasan ini yang akan menjadi dasar berpikir untuk melihat gejala biopolitik dalam *Pengacara Jalanan*, yang dapat menjadi representasi politik-hukum di Amerika. Tulisan ini akan melihat bagaimana tunawisma dibentuk menjadi *homo sacer* dan perlawanan yang dilakukan atasnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kerangka metodologis dalam penelitian ini terdiri dari penentuan objek, pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini objek material yang digunakan adalah novel *Pengacara Jalanan* karya John Grisham. Objek formal (Faruk, 2017, p. 23) dalam penelitian ini adalah paradigma filsafat Giorgio Agamben.

Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik simak-catat dengan cara pembacaan intensif terhadap novel *Pengacara Jalanan* dan sumber referensi pendukung lainnya. Data-data yang relevan akan dicatat dalam tabel data dengan kategori *bare life*, *homo sacer*, dan perlawanan.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan klasifikasi data-data sesuai dengan rencana subjudul pembahasan. Kemudian, data ditafsirkan dengan berpijak pada perspektif Agamben.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan secara umum.

PEMBAHASAN

Melalui pembacaan terhadap *Pengacara Jalanan* secara intensif dengan paradigma Giorgio Agamben, maka dapat ditemukan bahwa negara tampil dengan kekuasaannya dalam mengatur warga negara. Pengaturan ini diimplementasikan dengan penangguhan hukum bagi para tunawisma untuk memproduksi dan mereproduksi bentuk kehidupan *bare life* bagi tunawisma. Dengan begitu tunawisma menjadi *homo sacer* di dalam tatanan negara tersebut. Hal-hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sosial di dalam *Pengacara Jalanan*.

Kemiskinan Sebagai Sumber Produksi dan Reproduksi *Bare Life*

Membaca tunawisma dalam *Pengacara Jalanan* adalah membaca kemiskinan dari tubuh Amerika. Kemiskinan tersebar dalam seluruh rangkaian peristiwa, dan bahkan menjadi sebab atas peristiwa-peristiwa lainnya. Kemiskinan di Amerika ditampilkan secara simbolis yang seolah-olah biasa, wajar, dan normal bagi kehidupan tunawisma.

Salah satu yang menarik terdapat pada peristiwa ketika Devon Hardy memperoleh sup dan biskuit gratis ditempat penampungan.

“Aku makan sup. Sup dan biskuit di tempat penampungan. Sup gratis, dan aku bersyukur bisa memperolehnya. Kau bisa memberi makan ratusan temanku dengan uang tiga puluh dolar, ngerti?” (Grisham, 2010, pp. 21–22)

Dari kutipan di atas dapat digarisbawahi dua poin penting, yaitu tempat penampungan dan sup dan biskuit gratis. Keduanya merupakan gejala dari kemiskinan dan kerentanan untuk lebih jauh disebut ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Masyarakat miskin yang

biasanya tidak memiliki tempat tinggal dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, dalam hal ini seolah-olah mendapatkan bantuan dari negara dengan memberikan tempat tinggal dan makanan gratis. Tunawisma yang memperolehnya tentu saja menyebut hal ini dengan “*aku bersyukur bisa memperolehnya*”, yang artinya negara telah menempatkan dirinya sebagai pahlawan bagi tunawisma dan masyarakat miskin lainnya.

Namun tentu saja masih banyak masyarakat miskin lainnya yang terdampar di berbagai tempat tidak jelas setiap harinya karena tidak memperoleh tempat tinggal. Selain itu, bantuan makanan yang disediakan melalui dapur umum oleh negara tidak melulu memberikan makanan yang bergizi. Ini menunjukkan bahwa negara tidak terlalu peduli menyoal kesehatan dan keselamatan warga negara yang miskin.

“...Malam ini kita beruntung karena ada ayam. Itu kemewahan. Biasanya hanya ada sayuran.”

“Roti ini tidak baru.”
“Memang, tapi gratis. Sumbangan dari pabrik roti besar, sisa kemarin.”
(Grisham, 2010, pp. 87)

“Mereka tinggal di gedung-gedung kosong. Orang-orang seperti itu bisa dibilang beruntung. Ada pula yang tinggal di jalanan, di taman, di terminal bus, di kolong jembatan. Mereka bisa bertahan asal cuaca tak terlalu buruk. Malam ini, bisa-bisa mereka akan membeku.” (Grisham, 2010, pp. 88)

Dua kutipan di atas menunjukkan kondisi makanan yang dikonsumsi tunawisma. Selain itu, ketiadaan tempat tinggal juga menjadi masalah besar karena di musim dingin seseorang dapat mati kedinginan apabila tidur di jalanan, taman, atau tempat terbuka lainnya, yang berkaitan langsung dengan keselamatan hidup. Ini menandakan bahwa negara tidak benar-benar memberikan akses untuk

tunawisma memperoleh kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal dan makan.

Dalam negara demokrasi modern, negara harus menjamin kesejahteraan warga negaranya, bahwa masalah kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara dan swasta yang hadir di dalam hukum dan kebijakan politik Amerika. Tugas negara adalah meniadakan kemiskinan. Namun, kemiskinan yang hadir di dalam negara justru tidak alamiah, melainkan lahir secara politis, sengaja diproduksi dan terus direproduksi dengan strategi-strategi tertentu oleh negara.

Kebijakan-kebijakan negara yang ditunjukkan di dalam *Pengacara Jalanan* secara eksplisit menunjukkan bahwa masyarakat miskin harus dipertahankan. Hal ini ditampilkan melalui pemotongan anggaran yang terjadi di beberapa sektor kerja, sebagai berikut:

- (1) Pemotongan anggaran bagi lembaga penjamin/pembantu tunawisma (lembaga bantuan hukum).

“Dulu waktu masih mendapat dana dari pemerintah federal, kami punya tujuh pengacara. Sekarang tinggal dua,” katanya. (Grisham, 2010, pp. 47)

14th Street Legal Clinic pada awalnya merupakan salah satu lembaga yang didanai oleh pemerintah. Sayangnya beberapa tahun kemudian, pemerintah memutuskan untuk menarik bantuan. Lembaga hukum itu kemudian didanai oleh badan amal. Perubahan sumber dana memberikan dampak besar pada kerja-kerja Street Legal Clinic karena terjadi pengurangan karyawan. Pada akhirnya hal itu juga mengurangi jangkauan atau kuantitas lembaga untuk memberikan bantuan hukum gratis pada para tunawisma.

Green sebagai Direktur juga harus memastikan bahwa pendanaan dari badan amal terus berlangsung dan cukup. Salah satu caranya dengan menekan pengeluaran untuk gaji karyawan.

Kebijakan ini tidak hanya merugikan para tunawisma untuk mengakses bantuan

hukum gratis, tetapi juga merugikan para karyawan karena tidak digaji dengan profesional terutama jika mempertimbangkan resiko yang mungkin dialami oleh pendamping hukum selama mendampingi para tunawisma.

(2) Pemotongan anggaran subsidi rumah.

“Kira-kira sepertiga yang berhak mendapat tunjangan rumah bagi penduduk berpenghasilan kecil menerimanya. Dalam lima belas tahun terakhir ini, dua setengah juta unit perumahan yang dikeluarkan pemerintah federal dipotong tujuh persen. Tak heran jika banyak orang hidup di jalanan. Pemerintah berusaha menyeimbangkan anggaran dengan menyengsarakan orang-orang miskin.” (Grisham, 2010, p. 220)

Kutipan di atas ialah penjelasan Green terhadap Michael mengenai latar belakang tunawisma hidup di jalanan. Pemerintah memiliki berbagai program dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Sayangnya, sama seperti kasus pemotongan bantuan bagi 14th Street Legal Clinic, berbagai bantuan itu perlahan-lahan juga dikurangi dengan dalih menyeimbangkan anggaran pengeluaran. Sayangnya, cara yang ditempuh justru dengan memangkas bantuan bagi masyarakat miskin.

Dalam kasus subsidi rumah, anggaran awal bahkan belum mampu memberikan rumah bagi setiap masyarakat miskin. Alih-alih ditambah, anggaran subsidi rumah justru dipangkas. Masalah lain seperti lonjakan kenaikan harga sewa juga membuat rumah menjadi semakin sulit untuk diakses karena upah minimum yang hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Maka tak heran jika akhirnya banyak dari mereka yang berakhir di jalanan.

(3) Pemotongan anggaran tenaga kerja.

“DeVon hardy telah bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan di National Arboretum. Dia kehilangan pekerjaannya akibat

pemotongan anggaran.” (Grisham, 2010, pp. 47)

Sebelum menjadi gelandangan, Hardy menjalani hidup seperti masyarakat lainnya. Ia bekerja dan tinggal di rumah sewa. Nahas kemudian, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang merenggut kehidupan Hardy. Ia kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak dapat membayar uang sewa dan kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu membuatnya terusir dari rumah sewa dan berakhir di jalanan.

Bagi pemerintah kebijakan baru dibuat untuk menghemat anggaran belanja. Namun kebijakan itu justru merugikan para buruh seperti Hardy. Kehilangan pekerjaan membawanya jauh pada kehidupan jalanan dan dalam beberapa waktu, untuk memenuhi kebutuhannya, ia mencuri, ditangkap, kembali lagi ke jalanan, begitu seterusnya.

(4) Pemotongan anggaran subsidi kesehatan.

“Bagaimana dengan klinik? Buat kami disediakan klinik-klinik kecil.... Pemerintah biasanya membantu membayar sewa, membelikan persediaan obat-obatan... Sekarang pemerintah dipegang Newt dan semua uang itu tak ada lagi.” (Grisham, 2010, pp. 26)

Ketika menyandera beberapa karyawan biro hukum Drake and Sweeney, Hardy menyampaikan berbagai persoalan yang dialami oleh tunawisma seperti dirinya. Ia terlihat memanfaatkan situasi itu untuk memprotes banyak hal, terutama *gap* yang terjadi di dalam masyarakat Washington DC, antara tunawisma dan orang-orang yang hidup serba berkecukupan.

Kutipan di atas merupakan salah satu protes yang ditujukan hardy kepada semua sanderanya. Ia menjelaskan sulitnya para tunawisma mengakses hak kesehatan setelah pergantian presiden. Kebijakan baru yang diterapkan Newt tidak hanya memiskinkan tunawisma melalui

pemutusan bantuan pendanaan lembaga bantuan hukum, pemangkasan subsidi rumah dan tenaga kerja, tetapi juga mengambil hak kesehatan mereka.

Dari berbagai bentuk pemotongan anggaran yang dilakukan oleh negara, negara dapat dicurigai sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak ingin mengeluarkan pembiayaan untuk tunawisma karena pembiayaan ini sama sekali tidak menguntungkan negara. Dalam negara modern ini disebut dengan kuasa keuangan yang dicirikan dengan berjayanya kapitalisme sebagai sistem politik-ekonomi di Amerika.

Ellen Meiksins Wood menemukan titik mula kapitalisme adalah di Inggris pada abad ke 16 yang terbentuk ketika pasar menjadi sebuah paksaan. Pasar bukanlah mekanisme perdagangan biasa melainkan bertransformasi menjadi penentu utama dan seluruh aspek kehidupan lainnya, bahkan kehidupan itu sendiri. Dalam menjalankan mekanisme paksaannya, kapitalisme membutuhkan paksaan persaingan, maksimalisasi profit, keharusan menginvestasikan kembali laba, dan memaksimalkan produktivitas tenaga kerja serta pengembangan produksi (Karimasari, 2019). Sistem ekonomi yang kapitalistik ini juga menjadi mode ekonomi Amerika.

Berbagai pencabutan dan pemangkasan anggaran yang telah dijelaskan di atas menandakan bahwa Amerika memangkas seluruh pengeluaran yang tidak memberikan nilai positif bagi ekonomi Amerika. Dalam ekonomi, pengeluaran berupa subsidi rumah, anggaran belanja untuk karyawan, dan dana kesehatan, tidak dapat dihitung sebagai “modal” yang nantinya akan memberikan nilai lebih bagi pemerintah. Berbagai jenis pengeluaran itu dianggap sebagai beban bagi anggaran belanja negara.

Berlakunya kapitalisme sebagai sistem politik-ekonomi sebuah negara telah memaksa seluruh warga negaranya untuk tunduk dalam persaingan agar tetap dapat

bertahan hidup. Hal ini kemudian berkelindan dengan konsep *animal laborans* di mana manusia ditempatkan hanya sebagai tubuh pekerja yang produktivitasnya harus dimaksimalkan setinggi mungkin demi pasar.

Dalam *Pengacara Jalanan* kalkulasi kapitalisme tersebut tidak dapat ditemukan di tubuh para tunawisma. Sehingga negara menganggap tunawisma menyalahi persaingan pasar. Di lain pihak, negara juga tidak dapat menyediakan berbagai fasilitas yang tidak dapat memberikan nilai tambah pada negara. Maka, di sini persoalan menjadi terang bahwa negara terus memproduksi dan mereproduksi warga negaranya untuk menjadi tunawisma, seperti yang dinyatakan Michaels (Akiyoshi Suzuki, 2017) dengan terus mempertahankan kemiskinan bagi mereka. Ruang miskin inilah yang menjadi *bare life* bagi tunawisma yang kemudian membentuk tunawisma menjadi *homo sacer*.

Padahal kemiskinan di Amerika sendiri merupakan sebuah paradoks atau kontras (2011, p. 16), (2017), (2022, p. 384) yang mencolok karena meluas di tengah kemakmuran dan dedikasi Amerika terhadap kesetaraan dan peluang, terutama Hak Asasi Manusia (HAM)

Tunawisma sengaja diatur dalam kemiskinan dengan tujuan untuk menampilkan kedaulatan negara Amerika. Negara akan menjadi berdaulat ketika warga negara masih bergantung padanya. Untuk itu membuat tunawisma bergantung dan terus-menerus (seolah) membutuhkan negara menjadi strategi biopolitik Amerika untuk melegitimasi kekuasaan dan kedaulatannya.

Kondisi itu bahkan masih terus terjadi hingga hari ini, seperti pernyataan Desmond, Sosiolog peneliti kemiskinan di Amerika bahwa “... kemiskinan bukan sekedar tidak mempunyai cukup uang. Tapi sebuah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup pilihan dan dimanfaatkan karena hal itu.” (Desmond, 2023)

Tunawisma sebagai *Homo Sacer*

Tunawisma tidak hadir secara natural dan alamiah. Tunawisma sengaja di-adakan untuk membangun hierarki antara manusia dan binatang, atau dalam perspektif biopolitik antara *homo laboran* dan *animal*. Manusia pekerja dan manusia tidak bekerja (baca: binatang). Tidak bekerja artinya tidak produktif, dan tidak produktif artinya tidak memberikan keuntungan bagi negara. Namun, negara membutuhkan orang-orang yang tidak bekerja ini dalam strategi kedaulatannya.

Dalam *Pengacara Jalanan* ada satu peristiwa yang mengindikasikan bahwa negara melalui kebijakannya berupaya untuk membuat warganya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hak atas akses pekerjaan merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh negara. Dengan tidak mendapatkan pekerjaan, maka resmi seorang warga negara menjadi tunawisma.

“Dia (Hardy) kehilangan pekerjaannya akibat pemotongan anggaran. Dia pernah dipenjara beberapa bulan karena merampok. Keluar dari situ, dia jadi gelandangan.” (Grisham, 2010, p.47)

“Ms. Cather akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan membongkar barang untuknya (Lontae) di toko serba ada..” (Grisham, 2010, p. 406)

Dua kutipan tersebut telah mampu menunjukkan betapa sulitnya masyarakat Amerika mendapatkan pekerjaan. Dalam kasus tunawisma seperti Hardy dan Lontae, situasi menjadi semakin sulit bagi mereka karena identitas mereka sebagai tunawisma. Stereotip negative terhadap mereka yang hidup di jalanan membuat mereka sulit mendapat kepercayaan orang lain.

Pada kasus Hardy, setelah ia dipecat dengan alasan anggaran, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan dengan umur yang tak muda lagi dan latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi kriteria pasar kerja Amerika. Begitu pula dengan Lontae. Seperti kutipan kedua, ia

mendapatkan pekerjaan melalui usaha dan jaringan Ms. Cather. Frasa “akhirnya berhasil” di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Tidak cukup sampai di situ, negara kemudian mencoba mengendalikan situasi dengan mengacaukan kehidupan para tunawisma dengan menggolongkannya sebagai seorang kriminal.

“*Tren* di Amerika adalah membuat tunawisma menjadi penjahat...” (Grisham, 2010, p. 223)

“... bahwa menjadi tunawisma termasuk tindak kriminal.” (Grisham, 2010, p. 224)

Green menjelaskan kepada Michael bagaimana Amerika sebagai sebuah negara menggiring tunawisma sebagai pelanggar hukum. Hal itu dijalankan melalui implementasi produk hukum yang dirancang secara khusus untuk tunawisma, sebagai berikut:

Tak boleh mengemis, tak boleh tidur di bangku taman, tak boleh tinggal di kolong jembatan, tak boleh menyimpan barang pribadi di taman umum, tak boleh duduk di trotoar, tak boleh makan di tempat umum...” (Grisham, 2010, p. 223)

Abraham, salah satu pengacara di 14th Street Legal Clinic, telah berhasil meyakinkan beberapa hakim federal bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Amendemen Pertama mengenai Hak Asasi Manusia. Namun beberapa kota secara selektif masih menerapkan kebijakan tersebut seperti menggelandang dan mabuk di tempat umum. Target dari undang-undang ini tentu saja para tunawisma karena mereka memang tinggal di jalanan dan berbagai tempat umum. Oleh karena itu Green akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tunawisma dijadikan kriminal atau penjahat oleh negara.

Aturan mengenai larangan-larangan dalam kutipan di atas justru berbanding terbalik dengan akses yang diberikan oleh

negara. Negara tidak menyediakan tempat penampungan yang cukup untuk seluruh tunawisma, sedangkan tunawisma tidak boleh tidur di taman, di kolong jembatan, di trotoar, dan tempat umum lainnya. Kehidupan tunawisma telah dikorbankan (Nice, 2011, p. 99) melalui peraturan-peraturan itu dengan dalih menjaga keamanan dan kenyamanan di ruang publik.

Selain menjadi objek yang dikorbankan dalam strategi kedaulatan negara, tunawisma juga menunjukkan posisinya sebagai *homo sacer* melalui kemampuannya untuk dibunuh, artinya tunawisma boleh dan dapat mati kapan saja dan di mana saja. Keakraban dengan potensi kematian inilah yang menjadi kritik kemanusiaan dalam bipolitik kekuasaan. *Pengacara Jalanan* menunjukkannya dengan sangat gamblang melalui kematian beberapa tunawisma.

“Mobil itu di parkir di jalan, bannya yang gundul terjebak dalam salju yang membeku. Di dalamnya meringkuk seorang ibu muda bersama empat anaknya, semua mati karena *asphyxiation*-kekurangan zat asam. (Grisham, 2010, p. 119).

Di lapangan kosong di samping toko minuman keras tersebut, di balik tumpukan puing dan pecahan batu bata, polisi menemukan mayat laki-laki muda kulit hitam. Darahnya masih segar, berasal dari dua lubang peluru di kepala. Ia kemudian dikenali sebagai Kito Spires. (Grisham, 2010, p. 414)

Dua peristiwa kematian di atas seolah tampil secara normal sebagai sebuah kecelakaan atau kejahatan biasa. Namun, sedikit berbeda pada kasus kematian Lontae dan empat anaknya. Kematian keluarga ini kemudian berhasil menyita perhatian warga Washington untuk menjalankan unjuk rasa. Sayangnya kematian Kito Spires yang tertembak dianggap sebagai pembunuhan biasa yang bisa dialami oleh semua tunawisma, sehingga tidak perlu dilakukan

penyelidikan mengenai sebab-sebabnya terbunuh dan siapa pembunuhnya.

Kedua kematian ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan karena negara tidak memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Kemiskinan dan status sebagai tunawisma membuat kematian mereka menjadi normal, biasa, dan wajar. Negara tak serius dengan berbagai kasus kematian tunawisma. Kematian tunawisma tak mendapatkan perhatian yang layak secara hukum untuk dianggap sebagai kasus kematian yang serius.

Ada satu peristiwa yang lebih signifikan untuk menunjukkan gejala pengabaian dan pembiaran negara terhadap kematian tunawisma. Peristiwa ini terjadi ketika DeVon Hardy ditembak mati oleh seorang polisi.

“Seorang polisi penembak jitu bersembunyi di balik penyekat ruang di samping meja Madam Devier, dua belas meter dari situ. Dia memperoleh sudut pandang jelas yang dibutuhkannya. Ketika Umstead membungkuk meraih troli, selama kurang dari sedetik kepala Mister (DeVon Hardy) terhalang. Penembak jitu itu membidik kepalanya. DeVon Hardy terjengkang tanpa mengeluarkan suara.” (Grisham, 2010, p. 31)

Hardy ditembak oleh SWAT atau satuan khusus negara yang diturunkan dalam situasi mendesak. Penyanderaan atas beberapa karyawan biro hukum Drake and Sweeney serta ancaman pengeboman yang dilakukannya membuatnya masuk ke dalam situasi khusus, di mana negara diperbolehkan melumpuhkannya untuk menyelamatkan warga sipil lainnya. Oleh karena itu penembakan terhadap Hardy tentu saja tidak mempertimbangkan latar belakang kenapa ia melakukan penyanderaan.

Pelegalan pembunuhan Hardy yang tunawisma dengan dalih menstabilkan kondisi chaos juga dapat dilihat dari peristiwa berikut ini:

“Tak ada saksi, tak ada petunjuk, tak ada apa pun. Cuma satu lagi preman jalanan yang tertembak di Distrik. (Grisham, 2010, p. 418)

Pada saat Green memenangkan tuntutan denda terhadap biro hukum Drake and Sweeney untuk kasus kematian Lontae beserta anaknya, ia dan Michael bertugas mencari keluarga Lontae sebagai penerima uang denda tersebut. Ayah dari salah satu anak Lontae kemudian ditetapkan sebagai pemegang hak tersebut. Green dan Michael telah menemukan siapa laki-laki itu, ia sama seperti Lontae, hidup di jalanan.

Sehari sebelum laki-laki itu dipanggil ke pengadilan, ia ditembak mati oleh orang tak dikenal di jalanan. Kematiannya tidak pernah diperkarakan karena dianggap pihak kepolisian sebagai hal lumrah yang terjadi di jalanan. Kepolisian menganggapnya hanya sebagai salah satu pertarungan di antara sesama tunawisma yang mengorbankan nyawa salah satunya. Kasus tidak pernah sampai di pengadilan.

Lain lagi dengan kematian DeVon Hardy, semua orang tahu siapa pembunuhnya tetapi semua orang sepakat bahwa kematiannya bukanlah bentuk pembunuhan melainkan misi penyelamatan bagi warga sipil yang justru menjadi keputusan heroik.

Tindakan Moderat dan Tindakan Radikal sebagai Perlawanan

Kehidupan di dalam *bare life* bukan kehidupan yang sepenuhnya mesti dihayati. Status *homo sacer* juga bukan untuk diterima sebagai penderitaan saja, tetapi dimanfaatkan untuk dapat melakukan perlawanan terhadap strategi biopolitik negara.

Tokoh-tokoh tunawisma dalam *Pengacara Jalanan* membuktikan bahwa bentuk kehidupan bahagia yang disebut Agamben dengan *form-of-life* harus dicari atau dibentuk sendiri. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika subjek menjadi *homo sacer* karena kebahagiaan dapat ditemukan ketika subjek tidak terikat oleh hukum apa

pun (Agamben, 2013, p. 59). Tunawisma sebagai subjek yang terlepas dari hukum, baik hak maupun kewajiban memiliki potensi untuk menemukan *form-of-life* atau kehidupan bahagia.

Usaha tunawisma untuk mencapai kehidupan bahagia ditunjukkan melalui tindakan moderat dan tindakan radikal.

Pertama, tindakan moderat dilakukan dengan (1) meminta bantuan pengacara publik agar dapat didampingi untuk memperoleh akses hak-hak sebagai warga negara; dan (2) bergabung dengan komunitas. Tindakan moderat yang pertama ditunjukkan oleh Ruby.

“Kau pengacara?” ia bertanya.
“Ya.”

“Untuk orang-orang sepertiku?”
Aku menduga ia tunawisma, dan cuma itulah syarat untuk menjadi klien kami.
“Tentu. Silakan,” sahutku sambil membuka pintu. (Grisham, 2010, p. 275)

Ruby merupakan klien pertama Michael. Pertanyaan kedua Ruby di atas menunjukkan bahwa ia merupakan satu dari sekian tunawisma yang mengetahui bahwa mereka memiliki hak pendampingan hukum gratis. Ruby memiliki anak, Terrence, dan membesarkannya di jalanan. Ia melakukan apapun untuk menghidupi Terrence termasuk melakukan hal ilegal seperti menjual obat bius dan prostitusi. Ia kemudian memutuskan menitipkan Terrence pada mantan majikannya dengan menyewa satu kamar keluarga tersebut karena takut Dinas Sosial akan merebut Terrence karena ia kecanduan alkohol dan obat bius.

Suatu hari ia tiba-tiba diminta menandatangani surat adopsi anak dan kehilangan hak asuhnya. Pertemuannya dengan Terrence hanya dimungkinkan jika ia menjalani rehabilitasi dan “bersih”. Sayangnya, ia tidak dapat mengakses rumah rehabilitasi sehingga mendatangi pengacara publik.

Michael berhasil membantunya mendapatkan akses ke rumah rehabilitasi

tetapi kabur setelah berhasil bertahan mengikuti sesi ceramah bagi pecandu alkohol, dan kembali mengonsumsi kokain. Atas ide Direktur rumah rehab, Ruby kemudian dibawa ke sebuah motel untuk menjalani isolasi. Sayangnya Ruby kemudian kabur dari proses isolasinya. Melihat pengalaman dan lingkungannya, dapat dipahami betapa sulitnya Ruby lepas dari kecanduan dan kembali lagi ke jalanan (hal. 374)

Upaya Ruby melalui rehabilitasi dan isolasi terlihat ganjil jika melihat posisinya sebagai tunawisma yang hidup serba kekurangan tetapi masih dapat mengakses narkoba dan alkohol. Di sinilah dapat dilihat posisi negara terhadap peredaran narkoba.

Pengalaman Ruby mengindikasikan bahwa negara tidak pernah benar-benar memutus perdagangan narkoba terutama di kalangan tunawisma. Narkoba, alkohol, dan obat bius justru dijual dengan harga murah sehingga memungkinkan tunawisma untuk terus mengonsumsi sehingga tidak akan pernah terlepas dari kecanduan.

Kecanduan ini kemudian menarik tunawisma semakin masuk ke dalam kehidupan jalanan. Oleh karena itu, narkoba, alkohol, dan obat bius dapat dipahami sebagai salah satu cara negara memiskinkan tunawisma sehingga tidak heran jika kemudian Ruby mengalami kegagalan meski telah melakukan perlawanan melalui tindakan moderat.

Tindakan moderat yang kedua ditunjukkan oleh Lontae yang kecanduan ganja dan alkohol.

“Lontae, wanita itu bertekad meninggalkan jalanan dan meluruskan hidup... ia sangat ingin membersihkan diri dan sembuh... ia menghadiri pertemuan AA/NA di tempat itu (House of Mary), dan melawan kecanduannya dengan penuh berani, meskipun kesembuhan belum berhasil dicapainya. Dengan cepat ia meningkatkan kemampuan membacanya, dan berkhayal punya pekerjaan tetap untuk menghidupi

keluarga kecilnya. (Grisham, 2010, p. 405-406)

Lontae telah hidup di jalanan sejak usia kanak-kanan. Ia berulang kali ditangkap untuk kasus mencuri, mabuk di tempat umum, kepemilikan ganja, hingga kasus prostitusi. Ia melakukannya untuk bertahan hidup di jalanan. Kerasnya kehidupan jalanan membuat ia menjadi ibu di usia yang amat muda, tentu saja tanpa suami. Anak-anaknya dilahirkan tanpa ayah. Namun, ia kemudian menemukan harapan setelah melahirkan anak terakhir, ia menemukan House of Marry, sebuah organisasi nonprofit yang memberdayakan perempuan tunawisma dengan berbagai keterampilan.

Setelah bergabung dengan organisasi tersebut, Lontae bertekad untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan melepaskan diri dari kehidupan jalanan. Ia bekerja dengan tekun dan mulai menyisihkan gajinya untuk membayar kamar sewa. Upaya tersebut dapat disebut sebagai tindakan moderat.

Kedua tindakan moderat di atas menjadi perlawanan tunawisma untuk memperoleh bentuk kehidupan lain yang keluar dari bentuk kehidupan *bare life*. Sayangnya, tindakan moderat ini gagal membawa tunawisma mencapai kehidupan bahagia yang mereka inginkan.

Perlawanan Lontae mengalami kegagalan karena ia tidak dapat melawan kekuatan yang lebih besar, yakni pemilik rumah sewa. Ternyata modal keterampilan dan ekonomi yang diberikan oleh House of Marry belum mampu memberi Lontae kekuatan untuk menghadapi pengusuran sepihak yang ia alami. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kuasa untuk melawan, dan pada akhirnya ia kembali ke jalanan dan mati.

Pengusuran tidak hanya menjatuhkan keluarga miskin ke lembah gelap tetapi mengarahkan mereka ke jalur berbeda dan leboh sulit lagi (Desmond, 2016, p. 299). Peristiwa ini menyiratkan bahwa pemilik modal ekonomi yang

besarlah yang dapat memenangkan pertarungan di dalam masyarakat.

Tindakan kedua, yaitu tindakan radikal yang diartikan sebagai tindakan yang secara hukum merupakan tindakan yang berada di luar struktur atau di luar tatanan simbolik, yang tentu terjadi tanpa mempedulikan hukum-hukum negara. Peristiwa ini ditunjukkan oleh DeVon Hardy karena diusir dari rumah sewanya lantaran tak mampu membayarnya.

“Berdiri! Rapat ke dinding,” kata lelaki itu, pistolnya digunakan dengan efektif. Kemudian ditodongkannya dekat sekali ke kepalaku, dan ia berkata, “Kunci pintu!” (Grisham, 2010, p. 8)

DeVon Hardy memutuskan untuk memasuki kantor Drake and Sweeney secara ilegal dan menyekap para ahli hukum di sana karena ia sedikit banyak mengetahui bahwa kantor itu telah dipilih sebagai ahli hukum pemilik lahan rumah sewanya, sehingga turut bertanggung jawab atas pengusuran yang ia alami.

Hardy berharap tindakannya itu akan menghasilkan empati dan keadilan bagi tunawisma sehingga ia bisa mendapatkan tempat tinggalnya lagi.

Sayangnya upayanya untuk lari dari kematian (kejamnya kehidupan jalanan) meningkatkan potensinya untuk dibunuh, dan pada akhirnya tindakan radikalnya justru menjadi alasan kematiannya. Kematian Hardy menunjukkan bahwa dirinya adalah *homo sacer*, yaitu manusia yang dibunuh sebagai sesembahan untuk menyelamatkan manusia lainnya. Dalil ini digunakan oleh kepolisian sebagai bentuk menjaga keselamatan publik.

Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tunawisma, baik secara moderat maupun secara radikal tidak mampu mengeluarkan mereka dari *bare life*. Ini menunjukkan kuasa negara dalam tatanan simbolis begitu kuat. Berbagai perlawanan yang dilakukan oleh tunawisma dapat diatasi oleh negara dengan menggunakan produk hukum dengan menanggukuhkan hukum tersebut. Penanggukhan hukum

digunakan dengan dalil kedaruratan, seperti kematian DeVon Hardy yang dianggap membahayakan keselamatan orang lain tanpa memedulikan sumber tindakan DeVon Hardy tersebut. Begitu pula dengan negosiasi hukum melalui pengacara publik maupun perjuangan komunitas, yang dapat dikelola secara administratif yang politis.

Dengan begitu *Pengacara Jalanan* menjadi suatu pembacaan ulang terhadap kekuatan politik Amerika untuk dapat memperoleh kedaulatannya. Demokrasi di Amerika telah dijalankan dengan memanfaatkan status warga negaranya sendiri. Bagi Amerika, tunawisma berada dalam zona tidak terbedakan, apakah mereka warga negara atau bukan. Inilah dasar demokrasi Amerika yang disebut Agamben politik radikal.

PENUTUP

Novel ini membangun hubungan yang khas dengan realitas negara Amerika hari ini. Kiritik atas Amerika hadir secara langsung melalui peristiwa-peristiwa mengenaskan yang dialami oleh tunawisma yang merupakan warga negara Amerika.

Amerika secara politis merawat kemiskinan dan terus mereproduksinya untuk menunjukkan bahwa negara hadir memberikan bantuan pada masyarakat miskin. Ini ditunjukkan dengan kehidupan tunawisma yang terus menerus dipertahankan dan tidak boleh hilang. Tunawisma menjadi *homo sacer* melalui proses pemiskinan itu, yang melalui regulasi formal tunawisma diupayakan untuk menjadi kriminal oleh negara.

Tunawisma sebagai warga negara berupaya melawan agar dapat keluar dari status kemiskinan dan menagih hak negara untuk melindungi warga negara. Berbagai tindakan itu dilakukan secara moderat dan secara radikal. Secara moderat tunawisma menempuh jalur yuridis formal dan secara radikal dengan teror dan ancaman. Namun kedua cara ini gagal membuat tunawisma keluar dari kemiskinan dan tetap terjebak di

dalam ruang tersebut. Kegagalan ini ditunjukkan oleh *Pengacara Jalanan* sebagai bentuk kritik terhadap demokrasi Amerika yang radikal, yang mengutamakan keuntungan dan kejayaan negara di atas keuntungan dan kejayaan warga negaranya.

Oleh karena itu, *Pengacara Jalanan* merupakan refleksi ulang negara demokrasi modern hari ini untuk dapat menjamin bentuk kehidupan warga negaranya, baik untuk negara itu sendiri maupun untuk warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (D. Heller-Roazen, Trans.). Stanford University Press.
- Agamben, G. (2004). *The Open: Man and Animal* (K. Attel, Trans.). CA: Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804767064>
- Agamben, G. (2005). *State of Exception* (K. Attel, Trans.). Chicago University Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226009261.001.0001>
- Agamben, G. (2013). *The Highest Poverty* (Adam Kotsko, Trans.). Stanford University Press.
- Agamben, G. (2020). *Homo Sacer: Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang*. (S. A. Herinarko, Trans.). IRCiSoD. <https://doi.org/10.1515/9780804764025>
- Akiyoshi Suzuki. (2017, September 8). Cloaking the Poor: Reading and Representation in American Literature. *The Activist History Review*. https://activisthistory.com/2017/09/08/cloaking-the-poor-reading-and-representation-in-american-literature/#_ftnref21
- Alamsyah, I. E. (2020, March 1). *Dompot Dhuafa USA dan IMYA Bagikan Makan Tunawisma AS*. https://republika.co.id/berita/q6iwo_s349/dompot-dhuafa-usa-dan-imya-bagikan-makan-tunawisma-as
- Alfian, M. (2019). *Novel Maryam sebagai Kritik terhadap Politik Kedaulatan dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Alston, P. (2017). *Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/statements/2017/12/statement-visit-usa-professor-philip-alston-united-nations-special-rapporteur>
- Azizah, F. N. (2007). *Social Justice on Jhon Grisham's The Street Lawyer: A Sociological Approach Research Paper*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Callahan, C., Entin, J., Hunt, I., & Nishikawa, K. (Eds.). (2022). Introduction: How American Literature Understands Poverty. *Duke University Press, 94, Number 3*, 384. <https://doi.org/10.1215/00029831-10084470>
- Desmond, M. (2016). *Evicted: Poverty and Profit in the American city*. Crown.
- Desmond, M. (2023). *Poverty, by America*. The Crown Publishing Group.
- Dreiser, T. (1900). *Sister Carrie*. Doubleday.
- Faruk. (2017). *Metode Penelitian Sastra Sebuah Penjelajahan Awal*. Pustaka Pelajar.
- Faulkner, W. (1936). *Absalom, Absalom!* Random House.
- Fitzgerald, F. S. (1925). *The Great Gatsby*. Charles Scribner's Sons.
- Grisham, J. (2010). *The Street Lawyer* (W. Kirana & Pandia, Trans.). Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadha, R. (2017, November 26). *Di Balik Paras Kapitalisme AS*, https://republika.co.id/berita/q6iwo_s349/dompot-dhuafa-usa-dan-imya-bagikan-makan-tunawisma-as

- Gelandangan di Negeri "Pakde Sam."*
<https://www.suara.com/news/2017/11/26/145401/di-balik-paras-kapitalisme-as-gelandangan-di-negeri-pakde-sam?page=all>
- Karimasari, N. (2019, February 9). *Dalil Pokok Kapitalisme*. <https://indo-progress.com/2016/02/dalil-pokok-kapitalisme/>
- Rank, Mark R. (2011). Rethinking American Poverty. *Contexts*, 10, Issue 2, 16–21. <https://doi.org/10.1177/1536504211408794>
- Mishel, L., Bernstein, J., & Schmitt, J. (1999). *The State of Working America 1998-99* (p. 414). Economic Policy institute. https://www.epi.org/publication/books_swa98/#anchor99083
- Monica Potts. (2023, May 3). Top 10 books about being poor in America. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/books/2023/may/03/top-10-books-about-being-poor-in-america-the-forgotten-girls-by-monica-potts>
- Nasrullah, M. (2013). *Poor People Struggle in Grisham's "The Street Lawyer"*. Universitas Hasanuddin.
- Nice, J. (2011). Poverty as an Everyday State of Exception. *University of San Francisco School of Law*, No. 211-26, 67–110.
- Pilkington, E. (2017). *A journey through a land of extreme poverty: Welcome to America*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/society/2017/dec/15/america-extreme-poverty-un-special-rapporteur>
- Stringer, L. (1988). *Grand Central Winter*. Seven Stories Press.
- Sudiby, A. (2019). *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*. Marjin Kiri.
- Utomo, S. W. (2008). *Homelessness: John Grisham's View upon Social Injustice Reflected in The Street Lawyer (A Sociological Approach)*. Universitas Sebelas Maret.
- Wright, R. (1940). *Native Son*. Harper & Brothers.